



**DPMPTSP
REMBANG**

PERUBAHAN RENCANA KERJA 2024

**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
KABUPATEN REMBANG**

Jalan Jend. Sudirman no.5 Rembang

www.dpmptsp.rembangkab.go.id

(0295)6984014

KATA PENGANTAR

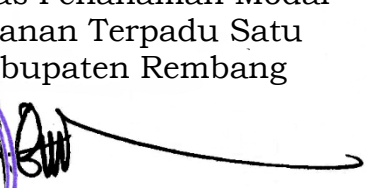
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT , karena atas petunjuk-NYA, kami dapat menyusun Perubahan Renja DPMPTSP Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2024. Renja DPMPTSP Kabupaten Rembang ini disusun untuk memenuhi amanah dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah , Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan Renja Kerja DPMPTSP Tahun 2024 berpedoman pada Surat Edaran Bupati nomor 000.7/2696/2024 tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kabupaten Rembang, atas Perda Nomor 2 tahun 2021 tentang RPJMD Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2021 s.d 2026, Renstra DPMPTSP Kabupaten Rembang Tahun 2021 – 2026, dan RKPD Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2024 dengan tujuan untuk menjamin kesesuaian antara program,kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran , serta perkiraan maju. Selain itu dalam Rencana Kerja memuat evaluasi hasil capaian Renja DPMPTSP Tahun 2024 , dengan tujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan /atau kegiatan baru yang disusun dalam Rancanagan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Rembang Tahun 2021 – 2026.

Dengan penyusunan Perubahan Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2024, kami berharap dapat memberikan nilai manfaat dalam proses Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Rembang.

Rembang, 20 September 2024
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Rembang




BUDIYONO, S.Kom, MM
Pembina
NIP.19770303 200604 1 019

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2-6
1.3 Maksud dan Tujuan	6-7
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DAERAH	
TAHUN 2022	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun	
Lalu dan Capaian Renstra OPD	8-25
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kab.	
Rembang	25-30
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	
DPMPTSP Kab. Rembang	31-35
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	35-46
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	47
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, pemerintah	
Provinsi Jawa Tengah dan Visi Misi dan Program Bupati	
dan Wakil Bupati	47-50
3.2 Tujuan dan sasaran Renja DPMPTSP	50-54
3.3 Program, Kegiatan dan sub kegiatan	55-57

BAB IV RENCANA DAN PENDANAAN DPMPTSP KABUPATEN 58
REMBANG
BAB V PENUTUP 63

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pekerjaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Juni DPMPTSP Kab. Rembang 8
Tabel 2.2	Realisasi Kinerja dan Keuangan DPMPTSP Kabupaten Rembang Tahun 2022 17
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kab. Rembang 28
Tabel 2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kab. Rembang 36
Tabel 2.5	Usulan Program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Rembang..... 46
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMPTSP Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 52
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Kerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan DPMPTSP Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025..... 59

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Dokumen perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD).

Dalam rangka mengintegrasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang, semua Perangkat Daerah di Kabupaten Rembang wajib menyusun dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja). Perubahan Ranwal Renja mempunyai fungsi penting dalam evaluasi system perencanaan daerah, karena di dalam perubahan renja menterjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dan Renstra Daerah ke dalam rencana, program dan penganggaran tahunan. Selain itu Perubahan Renja menjembatani sinkronisasi dan harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah pelaksanaan program tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Perubahan Renja merupakan pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja (RAPBD), dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama-sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan pemerintah.

Secara hirarki penyusunan Perubahan Rencana Kerja SKPD merupakan produk dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, diserasikan dengan rencana kerja pemerintah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran

Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD), Perubahan Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang tahun 2024 merupakan kewajiban dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang. Hal ini dilakukan selain mengakomodir perubahan nomenklatur, juga untuk dapat menerapkan dan menyelaraskan berbagai aspek kebijakan kepala daerah yang tertuang dalam penjabaran tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang sebagaimana diinginkan oleh Kepala Daerah, dalam hal ini Bupati Rembang. Perubahan Renja DPMPTSP disamping berfungsi sebagai pedoman kerja dan dokumen, juga diharapkan dapat menyatukan visi, misi, persepsi dan strategi seluruh aparat di DPMPTSP Kabupaten Rembang di dalam membina, melayani, dan memfasilitasi pembangunan serta pemberdayaan masyarakat yang lebih baik melalui pelayanan publik yang optimal. Selain itu dapat digunakan sebagai bentuk sarana evaluasi kinerja tahun sebelumnya sehingga diharapkan dapat menjadi tolok ukur untuk bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada DPMPTSP Kabupaten Rembang.

1.2. Landasan Hukum

- (1). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
- (2). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Program Pembangunan Nasional;

- (3). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
- (4). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- (5). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- (6). Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55679);
- (7). Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- (8). Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- (9). Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- (10). Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- (11). Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- (12). Peraturan Presiden No 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
- (13). Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- (14). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
- (15). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (16). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- (17). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- (18). Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- (19). Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2005 – 2025;
- (20). Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Rembang;
- (21). Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- (22). Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 16 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 – 2026;
- (23). Peraturan Bupati Rembang Nomor 33 Tahun 2012 tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Rembang;
- (24). Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten Rembang;
- (25). Peraturan Bupati Rembang Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;

- (26). Peraturan Bupati Rembang Nomor 36 Tahun 2016 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Rembang Tahun 2016 – 2025;
- (27). Peraturan Bupati Rembang Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Rembang;
- (28). Peraturan Bupati No. 19/2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024
- (29). Rancangan RPJMD Teknokratik Kabupaten Rembang Tahun 2021-2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja DPMPTSP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada Tahun 2024. Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Rembang Tahun 2024 adalah :

- (1). Menyediakan dokumen rencana teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang dengan menggunakan pendekatan kinerja yang diawali dengan pernyataan masalah dan target kinerja yang terukur, penetapan arah kebijakan teknis yang terfokus, lengkap dengan informasi mengenai lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;
- (2). Menyediakan alat bantu dalam rangka memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang atas pelaksanaan program dan kegiatan secara terukur;
- (3). Menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024.

- (4). Penyesuaian Perubahan rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang Tahun 2024 merupakan langkah adaptasi program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Tahun 2024.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang Tahun 2024 adalah :

- (1). Menjamin tersusunya rencana program berbasis kinerja yang berorientasi pada pelayanan publik secara terukur;
- (2). Menjamin konsistensi pernacaan teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang dengan arahan strategis visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dijabarkan didalam RPJMD Kabupaten Rembang;
- (3). Memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja yang terukur, baik dalam bentuk laporan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang maupun sebagai bahan masukan dalam penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang Tahun 2024 adalan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

BAB II : Hasil Evakuasi Renja Perangkat Daerah
Triwulan II Tahun 2024

BAB III : Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan
Perangkat Daerah tahun 2024

BAB IV : Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Triwulan II Tahun 2024.

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2024 ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra perangkat daerah serta permasalahan dan hambatan yang dihadapi. Evaluasi Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Rembang tahun 2023 pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja program/kegiatan yang telah dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten Rembang selama kurun waktu tahun 2023. Untuk mengukur kinerja diperlukan penetapan seperangkat indikator kinerja yang merupakan alat untuk mengukur pencapaian suatu kebijakan/program/kegiatan dan sekaligus merupakan indikator untuk mengevaluasi dan menilai kinerja sebuah instansi.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang secara spesifik digunakan untuk menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan indikator-indikator kinerja ini harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung yang terorganisasi, sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan. Adapun rekapitulasi Evaluasi Hasil

Pelaksanaan Renja dan Renstra DPMPTSP tahun 2024
sebagaimana tabel 2.

Tabel 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Berjalan 2024 Dpmpstsp Kabupaten Rembang

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indicator kinerja Program(outcomes)/Kegiatan (output) Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Program, Kegiatan , Sub Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
									Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Triwulan II 2024	Tingkat Realisasi (%)	Proyeksi Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2024	Tingkat capaian realisasi target rentra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8= (7/6)*100	9)	10=(9/4)
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL								
2	18	01			PROGRAM PENUNNANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip	75	73,11	75		100	100	100
2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Keselaran Perencanaan terhadap capaian Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	18	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dok	100%	2 dok	2 dok	100%	2 dok	100%
2	18	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dok	100%	2 dok	2 dok	100%	2 dok	100%
2	18	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Lap	100%	4 Lap	100%	100%	4 Lap	100%
2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Dok Pelaporan Keuangan dengan kualitas baik	100 %	82 %	91,30 %	91,30 %	91,30 %	91,30 %	100 %

2	18	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	23 org	21 org/bln	223 org/bln	21 orng / bln	91,30 %	21 orng / bln	91,30 %
Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indicator kinerja Program(outcomes)/Kegiatan (output) Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Program, Kegiatan , Sub Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
									Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Triwulan II 2024	Tingkat Realisasi (%)	Proyeksi Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2024	Tingkat capain realisasi target rentra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8= (7/6)*100	9)	10=(9/4)
2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	% Pemenuhan Pelayanan Umum	100 %	100 %	100 %	85,7 %	85,7 %	85,7 %	100 %
2	18	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	1 paket	100 %	1 paket	1 paket	100 %	1 paket	100 %
2	18	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	100 %	1 paket	1 paket	100 %	1 paket	100 %
2	18	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	JUmlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	1 paket	100 %	1 paket	1 paket	100 %	1 paket	100 %
2	18	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakn	1 paket	100 %	1 paket	1 paket	100 %	1 paket	100 %
2	18	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dok	100 %	1 dok	-	-	-	-
2	18	01	2.06	0007	Penyedaiaan Bahan Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	100 %	1 paket	1 paket	100 %	1 paket	100 %
2	18	01	2.06	0008	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 lap	100	1 lap	1 lap	100 %	11 lap	100 %
2	18	01	2.07		Pengadaan Barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prontase ketercukupan Sarana dan Prasarana Aparatur	90%	100 %	90%	-	-	-	100 %
2	18	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana Gedung kantor lainnya yang disediakan	1 unit	-	1 unit	-	-	-	100 %
2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Pemenuhan Pelayanan Administrasi perkantoran	100 %	100 %	100 %			100%	100 %

2	18	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 lap	100 %	1 lap	1 lap	1 lap	100 %	100 %
Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indicator kinerja Program(outcomes)/Kegiatan (output) Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Program, Kegiatan , Sub Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
									Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Triwulan II 2024	Tingkat Realisasi (%)	Proyeksi Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2024	Tingkat capain realisasi target rentra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8= (7/6)*100	9)	10=(9/4)
2	18	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 lap	100 %	1 lap	1 lap	100 %	1 lap	100 %
2	18	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Lap	100 %	1 Lap	1 Lap	100 %	1 Lap	100 %
2	18	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 lap	100 %	1 lap	1 lap	100 %	1 lap	100 %
2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase BMD yang terpelihara dengan baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	18	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas atau kendaraan jabatan yang diperliharan dan dibayarkan pajaknya	20 unit	100 %	20 unit	10 unit	50 %	10 unit	50 %
2	18	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	-	1 unit	-	-	-	-
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jml perusahaan yang mendapat fasilitas kemudahan/insentuf penanaman modal	50 perusahaan	680 %	50 perusahaan	34	68 %	-	-
2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi	Jumlah Rekomendasi Laporan hasil evaluasi	50 perusahaan	680 %	50 perusahaan	-	-	-	-

					Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	penanaman modal yang di tindaklanjuti							
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indicator kinerja Program(outcomes)/Kegiatan (output) Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Program, Kegiatan , Sub Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
									Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Triwulan II 2024	Tingkat Realisasi (%)	Proyeksi Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2024	Tingkat capain realisasi target rentra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8= (7/6)*100	9)	10=(9/4)
					Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	1 dok	100 %	1 dok	1 dok	100 %	1 dok	100 %
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Pertumbuhan Investor	5 %	180 %	5 %	35 %	694 %	35 %	100 %
2	18	03	2.01	02	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	% Peningkatan Jumlah Investor	5 %	180 %	5 %	3 %	60 %	3 %	100 %
					Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 dok	100 %	2 dok	1 dok	50 %	1 dok	100 %
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	% penyelesaian penganganan pengaduan permasalahan perijinan dan non perijinan % penyelesaian permohonan perijinan dan non perijinan sesuai SOP	100 % 78 %	100 % 100 %	100 % 78 %	75 % 99,16 %	75 % 127 %	75 % 99,16 %	75 % 127 %
2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di	Presentase Indeks Kepuasan Masyarakat	85 %	110,20 %	85 %	93,22 %	109,67 %	93,22 %	109,67 %

					bidang Penanaman Modal yang Menjadi								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indicator kinerja Program(outcomes)/Kegiatan (output) Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Program, Kegiatan , Sub Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
									Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Triwulan II 2024	Tingkat Realisasi (%)	Proyeksi Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2024	Tingkat capain realisasi target rentra (%)
1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)*100	9)	10=(9/4)
2	18	04	2.01	0005	Koordinasi dan sinkronisasi Penetapan Pemeberian Fasilitas/insentif Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemeberian fasilitas/insentif yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	13 dok	-	13 dok	7 dok	53,8 %	7 dok	53,8 %
2	18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara lektronik	4500 pelaku usaha	-	4500 pelaku usaha	4205 pelaku usaha	93,40 %	4205 pelaku usaha	93,40 %
2	18	04	2.01	0007	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan berusaha berbasis resiko	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh layanan konsultasi perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintehrasi secara elektronik	1000 pelaku usaha	-	1000 pelaku usaha	528 pelaku usaha	52,80 %	528 pelaku usaha	52,80 %
2	18	04	2.01	0008	Pemantauan, analisis, evaluasi dan Pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis resiko	Jumlah kegiatan usaha yang mendapat pemantauan, analiss, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko lintas daerah kabupaten/kota bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	3000 kegiatan usaha	-	3000 kegiatan usaha	4205 pelaku usaha	140,16 %	4205 pelaku usaha	140,16 %

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indicator kinerja Program(outcomes)/Kegiatan (output) Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Program, Kegiatan , Sub Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
1	2	3	4	5					Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Triwulan II 2024	Tingkat Realisasi (%)	Proyeksi Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2024	Tingkat capain realisasi target rentra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8= (7/6)*100	9)	10=(9/4)
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	% investor yang taat peraturan	60 %	330,91 %	60 %	13,04 %	21,73 %	13,04 %	21,73 %
2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah kanupaten/kota	% investor/perusahaan yang taa aturan tentang pelaksanaan penanaman modal	50 %	182 %	50 %	13,04 %	26,08 %	13,04 %	26,08 %
2	18	05	2.01	0004	Penyelesaian Permasalahan dan hambatan yang di hadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatannya usahanya	Jumlah penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	10 keg usaha	-	10 keg usaha	20 keg usaha	200 %	20 keg usaha	200 %
2	18	05	2.01	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku usaha	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti bimbingan teknis/ Sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis risiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko	40 pelaku usaha	-	40 pelaku usaha	19 pelaku usaha	47,50 %	19 pelaku usaha	47,50 %
2	18	05	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usahadari pelaku dilakukan inspeksi lapangan ; serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha	60 keg usaha	-	60 keg usaha	23 kegiatan usaha	38,33 %	23 kegiatan usaha	38,33 %

Dari data sebagaimana tabel 2.1 tersebut di atas, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Triwulan II Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021- 2026 Triwulan II sampai dengan tahun berjalan Triwulan II DPMPTSP Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

- 1) Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Triwulan II Tahun 2024 DPMPTSP Kabupaten Rembang
 - a) Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan telah dilaksanakan 1 urusan, 5 program dengan 6 indikator kinerja program, dan 9 kegiatan dengan 9 indikator kinerja kegiatan.
 - b) Dari 6 indikator kinerja program, 1 indikator capaian target sudah memenuhi, dengan tingkat capaian realisasi target Renstra 100%
 - c) Dari 9 indikator kinerja kegiatan telah memenuhi target 2 indikator kegiatan
- 2) Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2022 sampai dengan Tahun 2023 DPMPTSP Kabupaten Rembang
 - a) Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 urusan, 5 program dengan 6 indikator program dan 9 kegiatan dengan 9 indikator.
 - b) Dari 6 indikator kinerja program yang telah memenuhi target 1 indikator program
 - c) Dari indikator kinerja kegiatan, terdapat 6 indikator yang telah melampaui target.

Perkiraan capaian Target Indikator Sasaran dan Indikator Tujuan/urusan (IKU) dalam Renstra yang menjadi Indikator Kinerja Utama DPMPTSP.

Tabel. 2.2
Realisasi Kinerja dan Keuangan Triwulan II DPMPTSP
Kabupaten Rembang Tahun 2024

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indicator kinerja Program(outcomes)/Kegiatan (output) Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Triwulan II			Anggaran dan Realisasi Keuangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Triwulan II		
							Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Capaian Realisasi Kinerja (%)	Anggaran APBD Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Realisasi Kinerja (%)
1					2	4	5	6	7=(6/5)*100	8	9	10=(9/8)*100
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					3.768.684.000	1.643.704.190	43,62 %
2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI SAKIP	73			3.588.356.000	1.529.258.355	42,62 %
2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Keselaran Perencanaan terhadap capaian Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	10.000.000	6.575.000	65,75 %
2	18	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang disusun	2 dok	2 dok	100%	2.500.000	1.250.000	50 %
2	18	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	JUmlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan RKA-SKPD	2 dok	2 dok	100%	5.000.000	2.825.000	56,50 %
2	18	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	4 Lap	100%	100%	2.500.000	2.500.000	100 %
2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Pemenuhan Palayanan Keuangan	91,30 %	91,30 %	91,30 %	2.375.596.000	1.184.530.070	49,86 %
2	18	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	JUmlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	223 org/bln	21 orng / bln	91,30 %	2.375.596.000	1.184.530.070	49,86 %
2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Ketercapaian Pelayanan Umum	100 %	85,7 %	85,7 %	96.975.000	32.722.094	33,85 %
2	18	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 paket	1 paket	100 %	4.000.000	630.000	15,75 %
2	18	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	100 %	6.500.000	3.262.000	50,18 %

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indicator kinerja Program(outcomes)/Kegiatan (output) Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Triwulan II			Anggaran dan Realisasi Keuangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Triwulan II		
							Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024
1					2	4	5	6	$7=(6/5)*100$	8	9	$10=(9/8)*100$
2	18	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	100 %	32.150.000	6.233.000	19,30 %
2	18	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 lap	1 lap	100 %	3.025.000	301.000	9,95
2	18	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dok	-	-	-	-	-
2	18	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	1 paket	100 %	9.000.000	2.469.000	27,43 %
2	18	01	2.06	0008	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 lap	1 lap	100 %	40.000.000	19.827.094	49,57 %
2	18	01	2.07		Pengadaan Barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prontase ketercukupan Sarana dan Prasarana Aparatur	90%	-	-	150.000.000	5.824.170	3,88 %
2	18	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana Gedung kantor lainnya yang disediakan	1 unit	-	-	150.000.000	5.824.170	3,88 %
2	18	01	2.07		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pemenuhan Pelayanan Kepegawaian	1 lap	1 lap	100 %	725.780.000	272.841.222	37,59 %
2	18	01	2.07	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	90%	-	-	500.000	300.000	60 %
2	18	01	2.07	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 Lap	1 Lap	100 %	187.200.000	85.085.597	45,45 %
2	18	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 lap	1 lap	100 %	27.000.000	2.585.000	9,57 %
2	18	01	2.07	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 lap	1 lap	100 %	511.050.000	184.870.625	36,17 %
2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase BMD yang terpelihara dengan baik	100 %	100 %	100 %	230.305.000	26.765.799	11,62 %
2	18	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas atau kendaraan jabatan yang diperliharan dan dibayarkan pajaknya	20 unit	10 unit	50 %	30.305.000	11.765.799	38,82 %

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indicator kinerja Program(outcomes)/Kegiatan (output) Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Triwulan II			Anggaran dan Realisasi Keuangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Triwulan II		
							Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	18	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	-	-	200.000.000	15.000.000	7,50 %
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jml perusahaan yang mendapat fasilitas kemudahan/insentif penanaman modal	50 perusahaan	34	68 %	16.000.000	14.955.500	93,47 %
2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas kemudahan/insentif penanaman modal	Drsf dokumen regulasi yang tersusun	50 perusahaan	-	-	16.000.000	14.955.500	93,47 %
2	18	02	2.01	0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota	Jumlah Kesepakatan kemitraan antara Usaha besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	1 dok	1 dok	100 %	16.000.000	14.955.500	93,47%
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Prosentase Pertumbuhan Investor	5 %	35 %	694 %	14.000.000	10.895.000	77,82 %
2	18	03	2.01	02	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil kegiatan promosi penanaman kabupaten/kota	5 %	3 %	60 %	14.000.000	10.895.000	77,82 %
2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten Kota	Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal kabupaten/kota	2 dok	1 dok	50 %	14.000.000	10.895.000	77,82 %
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Prosentase penyelesaian permohonan perizinan dan non perizinan sesuai sop	100%	75%	75	110.128.000	61.305.335	55,67 %
2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu satupintu di bidang Penanaman Modal yg menjadi kewenangan Daerah /Kab	Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan	85 %	93,22 %	109,67 %	110.128.000	61.305.335	55,67 %
2	18	04	2.01	0005	Koordinasi dan sinkronisasi Penetapan Pemeberian Fasilitas/insentif Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemeberian fasilitas/insentif yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	13 dok	7 dok	53,8 %	30.000.000	16.151.500	53,84 %
2	18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara lektronik	4500 pelaku usaha	4205 pelaku usaha	93,40 %	40.128.000	23.331.923	58,14 %

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indicator kinerja Program(outcomes)/Kegiatan (output) Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Triwulan II			Anggaran dan Realisasi Keuangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Triwulan II		
							Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024
1					2	4	5	6	7=(6/5)*100	8	9	10=(9/8)*100
2	18	04	2.01	0007	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan berusaha berbasis resiko	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh layanan konsultasi perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	1000 pelaku usaha	528 pelaku usaha	52,80 %	20.000.000	6.466.162	32,33 %
2	18	04	2.01	0008	Pemantauan, analisis, evaluasi dan Pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis resiko	Jumlah kegiatan usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko lintas daerah kabupaten/kota bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	3000 kegiatan usaha	4205 pelaku usaha	140,16 %	20.000.000	15.355.750	76,78 %
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	% investor yang taat peraturan	60 %	13,04 %	21,73 %	40.000.000	27.290.000	68,23 %
2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	% investor/perusahaan yang taat aturan tentang pelaksanaan penanaman modal	50 %	13,04 %	26,08 %	40.000.000	27.290.000	68,23 %
2	18	05	2.01	0004	Penyelesaian Permasalahan dan hambatan yang di hadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatannya usahanya	Jumlah penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	10 keg usaha	20 keg usaha	200 %	5.000.000	2.370.000	47,40 %
2	18	05	2.01	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku usaha	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti bimbingan teknis/ Sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis risiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko	40 pelaku usaha	19 pelaku usaha	47,50 %	20.000.000	14.077.000	70,39 %
2	18	05	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usahadari pelaku dilakukan inspeksi lapangan ; serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha	60 keg usaha	23 kegiatan usaha	38,33 %	15.000.000	10.834.000	72,29 %

Dilihat dari tabel 2.2. diatas pada tahun 2024 terdapat 5 program. Hal ini dilakukan sebagai upaya sinkronisasi Rencana Kerja DPMPTSP tahun 2024 yang berpedoman pada Kemendagri 050-5889 tentang Nomenklatur dan Perda nomor 2 tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2021-2026 dengan Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Rembang tahun 2021-2026. Dengan harapan semua target indikator program yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2021-2026 yang ditindaklanjuti dengan Perubahan Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Rembang tahun 2021-2026 dapat tercapai.

Dari segi anggaran pada tahun 2024 terdapat penurunan. Pada tahun 2024 anggaran senilai Rp. 3.768.484.000 dan pada tahun 2023 senilai Rp. 5.376.522.800.

Pada dasarnya sebagian besar kegiatan secara fisik dapat dilaksanakan 100%, sesuai dengan target yang direncanakan, sedangkan realisasi keuangan terserap masih di bawah 100% dari target yang direncanakan, hal ini dikarenakan faktor efesiensi dalam pemanfaatan dana anggaran. Permasalahan penyerapan anggaran yang tidak maksimal disebabkan oleh sisa belanja tidak langsung (gaji & tunjangan), sisa kontrak, dan adanya efisiensi penggunaan dana pada beberapa kegiatan atau masih kurangnya kecermatan dalam menyusun Rancangan Awal Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) yang menjadi pedoman pelaksanaan program/kegiatan baik dari sisi anggaran maupun dari indikator kinerja turut menentukan serapan dan alokasi anggaran yang dibutuhkan. Permasalahan tersebut juga berkaitan dengan belum dimilikinya Analisis Standar Biaya (ASB) untuk Program/kegiatan yang dilaksanakan, sehingga tidak ada standar baku yang dapat diterapkan dalam alokasi anggaran kegiatan.

Pada tahun anggaran 2023, DPMPTSP Kabupaten Rembang memiliki total anggaran sebesar Rp. 5.376.522.800. Dari jumlah tersebut, belanja tidak langsung sebesar Rp.

2.389.365.300 dan belanja langsung sebesar Rp 3.987.157.500. Jumlah anggaran tersebut digunakan untuk membiayai belanja tidak langsung dan belanja langsung, terdiri dari 5 program / 13 kegiatan.

Sedangkan pada tahun anggaran 2024 DPMPTSP Kabupaten Rembang memiliki total anggaran sebesar Rp. 3.768.484.000,-. Dari jumlah tersebut, belanja tidak langsung sebesar Rp,0- dan belanja langsung sebesar Rp 3.768.484.000,-. Jumlah anggaran tersebut digunakan untuk membiayai belanja tidak langsung dan belanja langsung, terdiri dari 5 program / 13 kegiatan. Anggaran yang terserap dari total anggaran sampai dengan semester 1 pada tahun 2023 adalah sebesar Rp. 1.724.596.478 atau sekitar 32%

Secara garis besar capaian kinerja keuangan dan fisik merupakan sokongan untuk mencapai target indikator urusan, indikator program dan indikator kegiatan. Pencapaian indikator urusan yang merupakan indikator kinerja utama (IKU) merupakan satu hal yang penting mengingat peran dalam fungsi penunjang urusan pemerintahan yaitu urusan Urusan Penanaman Modal.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang

Penyelenggaraan pelayanan DPMPTSP Sesuai Peraturan Bupati Rembang Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang dalam melaksanakan peran dan tanggungjawabnya adalah sebagai berikut:

a. Tugas

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan

urusan pemerintahan daerah dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi :

- 1) perumusan kebijakan urusan pemerintahan daerah dibidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 2) pelaksanaan koordinasi kebijakan dibidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu;
- 3) pelaksanaan kebijakan di bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan bidang Tenaga Kerja;
- 4) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu;
- 5) pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
- 6) pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
- 7) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan DPMPTSP Kabupaten Rembang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra DPMPTSP Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan capaian indikator urusan penunjang Pemerintahan dalam hal ini urusan pemerintahan daerah dibidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tabel berikut:.

DPMPTSP Kabupaten Rembang sesuai dengan tugas dan fungsinya berupaya untuk memastikan urusan pemerintahan daerah dibidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat berjalan optimal, berkesinambungan dan sinergis. Upaya tersebut diwujudkan

dalam kinerja pelayanan perangkat daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2016-2021. Pencapaian kinerja DPMPTSP Kabupaten Rembang dirumuskan dan dikaji berdasarkan format tabel T-C.30 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan DPMPTSP Kabupaten Rembang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra DPMPTSP Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan capaian indikator urusan pemerintahan daerah dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Adapun capaian kinerja untuk sasaran, urusan yang mendukung urusan pemerintahan daerah dibidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan diampu oleh DPMPTSP Kabupaten Rembang sebagaimana dalam Bab. IV Renstra DPMPTSP Kab. Rembang tahun 2021-2026 dan Bab VIII RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026.

Tabel 2.3.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah DPMPTSP
Kabupaten Rembang

No	Indikator Tujuan/Sasaran Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	5	6	9	10	11	12	13
	Renstra 2021-2026							
	TUJUAN							
1.	Prosentase Pertumbuhan Innestor	5%	5%	16,15	9%	1		
.	SASARAN							
1.	Nilai Realisasi Penanaman Modal	1.129	600M	994 M	1,029 T	700M	1T	
2.	Indek Kepuasan Masyarakat	85	85	91,96	92,68	94,00	95	
	PROGRAM KEGIATAN							
I	NILAI SAKIP	73	74	72	72	75	76	
1	% Keselarasan Perencanaan terhadap capaian Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	
1	Jumlah Dokumen perencanaan Prangkat Daerah	2	2	100	100	2	2	
2	umlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	2	100	100	2	2	
3	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7	4	100	100	4	12	
2	% Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik	100	100	100	100	100	100	
4	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23	23	100	100	22	22	
3	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum	100	100	100	100	100	100	
5	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1pkt	1pkt	100	100	1pkt	1pkt	
6	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1pkt	1pkt	100	100	1pkt	1pkt	
7	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1pkt	1pkt	100	100	1pkt	1pkt	
8	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1pkt	1pkt	100	100	1pkt	1pkt	
9	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dok	1dok	100	100	1 dok	1 dok	
10	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1pkt	1pkt	100	100	1pkt	1pkt	
11	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 lap	12 lap	100	100	12	12	

4	Persentase ketercukupan sarana dan prasarana	90%	90%	100	100	90%	90%	
12	Terlaksananya pengadaan perlatan dan mesin lainnya	1pkt	1pkt	100	100	1pkt	1pkt	
5	Tercukupinya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1pkt	1pkt	100	100	1pkt	1pkt	
	% Ketercukupan Sarana Prasarana Aparatur	100	100	100	100	100	100	
13	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	1unit	100	100	1 unit	1 unit	
6	% Pemenuhan Pelayanan Administrasi perkantoran	100	100	100	100	100	100	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 lap					
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 lap					
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12 lap					
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 lap					
7	% BDM Dengan Kondisi Baik							
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		20 unit					
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 unit					
II	Jumlah perusahaan yang mendapat fasilitas kemudahan/ insentif penanaman		50 Perusa haan					
8	Jumlah Rekomendasi Laporan hasil evaluasi penanaman modal yang di tindaklanjuti	1 dok	1 dok	100	100	3 dok	3 dok	
	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	5%	5%	100	100	5%	5%	
III	Pertumbuhan investor		5 %%					
9	% Peningkatan Jumlah Investor		5					
	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota		2 dok					
IV	% penyelesaian penanganan pengaduan permasalahan perijinan dan non perijinan % penyelesaian permohonan perijinan dan non perijinan sesuai SOP		100 78					

10	Indeks Kepuasan Masyarakat		86					
	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota		13 Dok					
	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		4500 pelaku usaha					
	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		1000 pelaku usaha					
	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha		3000 keg usaha	100	100	50	50	
V	% investor yang taat peraturan	50%	60%	100	100	60%	60%	
	Jumlah Investor/Perusahaan yang taat pada peraturan pelaksanaan penanaman modal	50 perusahaan	50 perusahaan	100	100	50 perusahaan	50 perusahaan	
	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya		10 keg usaha					
	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko		40 pelaku usaha					
	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha		60 keg usaha					

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran DPMPSTSP sampai dengan tahun 2023 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam upaya mencapai Tujuan tersebut memiliki indikator kinerja yaitu :
 - Indeks Kepuasan Masyarakat dengan realisasi nilai capaian 92,68 (capaian 108%) sudah tercapai.
2. Meningkatkan Investasi Daerah .Indikator capaian kinerja yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut yaitu:
 - Investasi Baru PMA dan PMDN dengan realisasi capaian 1,6 T (capaian 165%) sudah tercapai.

b. Sasaran DPMPTSP:

1. Meningkatnya Nilai Investasi , Indikator Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi Daerah dengan realisasi kinerja 12.873.468.784.412 (capaian 9%) sudah tercapai.
2. Meningkatnya Pelayanan Perizinan Sesuai SOP, indikator Presentase Peningkatan Pelayanan Perizinan, realisasi kinerja 100% (capaian 100%) sudah tercapai

Pada prinsipnya capaian kinerja urusan Penanaman Modal menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun yaitu indikator Persentase Peningkatan Tenaga Kerja Lokal Yang Terserap pada Penanaman Modal. Indikator menunjukkan ada peningkatan dapat dilihat dari capaian indikator Kinerja Utama DPMPTSP tahun 2024 yaitu Realisasi Investasi baru (tabel. 2.2).

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Pengembangan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang tentunya tidak lepas dari dinamika lingkungan internal dan eksternal. Dinamika lingkungan internal akan dikelola secara efektif dengan mengatasi secara bertahap berbagai kekurangan dan kelemahan melalui pengoptimalan penggunaan sumber daya. Akan tetapi dinamika eksternal yang berupa tantangan dan peluang

merupakan faktor-faktor penting yang berada di luar kendali instansi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang. Meskipun demikian, faktor eksternal tersebut harus terus dapat diidentifikasi karena sangat berpengaruh terhadap pencapaian kinerja Perangkat Daerah (SKPD).

Secara umum, tantangan dan peluang yang harus dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang ke depan adalah sebagai berikut :

A. Urusan penanaman modal

Beberapa hal yang masih menjadi tantangan dalam peningkatan urusan penanaman modal di Kabupaten Rembang adalah

- (1). Semakin meningkatnya peran nilai investasi dalam perhitungan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang;
- (2). Semakin tingginya harapan peran investasi dalam memecahkan permasalahan pengangguran dan upaya pemerataan pembangunan nasional;
- (3). Semakin banyaknya perizinan yang menjadi kewenangan dan dilimpahkan ke DPMPTSP Kabupaten Rembang akibat berlakunya UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta PP 24 tahun 2018 tentang pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik;
- (4). Semakin tingginya harapan masyarakat atas kualitas pelayanan publik;
- (5). Semakin tingginya tuntutan penerapan teknologi informasi.
- (6). Semakin kompetitifnya daerah tujuan penanaman modal Apabila Kabupaten Rembang tidak mampu menghadapi tantangan ini, konsekuensinya sangat besar, mulai dari hilangnya kesempatan kerja dan transfer teknologi yang tentu akan berakibat pada lambatnya penurunan kemiskinan.

Adapun peluang yang ada untuk dapat meningkatkan penanaman modal di Kabupaten Rembang antara lain:

- (1). Menjadi daerah tujuan utama penanaman modal di Provinsi Jawa Tengah karena lokasinya yang strategis dan biaya tenaga kerja yang masih murah jika dibandingkan daerah lainnya
- (2). Tingginya dukungan pemerintah pusat terhadap penanaman modal;
- (3). Iklim usaha yang kondusif di Kabupaten Rembang ;
- (4). Posisi geografis yang strategis dan terbangunnya infrastruktur transportasi nasional yang semakin baik;
- (5). Dukungan komitmen peningkatan pelayanan dari pimpinan daerah dan dukungan pemerintah pusat;
- (6). Struktur kelembagaan yang lebih kondusif dan akomodatif terhadap perkembangan perizinan.

Berangkat dari telaahan kondisi penanaman modal di Kabupaten Rembang baik dari tantangan dan peluang, maka dirumuskan isu-isu strategis kedepan yaitu:

1. Urusan Penanaman Modal

Untuk lebih meningkatkan minat para investor dalam melakukan penanaman modal di Jawa Tengah, maka Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang telah menginventarisir isu-isu strategis. Adapun isu-isu strategis tersebut mencakup:

- a. Kemajuan di bidang tata kelola pemerintahan, kompetensi SDM, dan ketersediaan infrastruktur dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
- b. Peningkatan Daya Tarik Penanaman Modal Belum optimalnya tindak lanjut kerjasama di bidang penanaman modal; promosi investasi dan daya tarik serta daya dukung investasi, persentase kerjasama di bidang investasi yang ditindak lanjuti sebesar 12,8 T pada tahun 2023. Jumlah investor cenderung tidak ada kenaikan yang signifikan pada tahun 2022 sebesar 11,8

T dengan 99 investor dan pada tahun 2022 terjadi peningkatan menjadi 167 investor dengan total investasi sebesar 11,6 T Peningkatan iklim penanaman modal yang berdaya saing berbasis keunggulan daerah;

- c. Peningkatan pelayanan publik dengan mengembangkan sistem yang transparan berbasis teknologi informasi.

Dalam rangka meningkatkan realisasi investasi di Kabupaten Rembang telah didukung dengan pelayanan perijinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) agar pelaku usaha dapat terfasilitasi dengan baik dalam pelaksanaan usahanya di Kab. Rembang. Saat ini pemerintah telah resmi meluncurkan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang disebut sebagai OSS (online single submission) pada tanggal 9 Juli 2018 sebagai tindak lanjut dikeluarkannya PP 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. Kemudian harus diikuti oleh setiap Pemerintah Daerah dengan menyediakan aplikasi perizinan secara mandiri atau dengan langsung menggunakan aplikasi si Cantik Cloud yang difasilitasi oleh Kemenkominfo dan terintegrasi dengan aplikasi OSS.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 62 tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja (DPMPTSP) Pada Penyusunan Renja DPMPTSP Kabupaten Rembang Tahun 2024 evaluasi fokus pelaksanaan Renja DPMPTSP Tahun 2024. Evaluasi yang dilakukan adalah pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan dikaitkan dengan pencapaian dan target Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Rembang Tahun 2016 – 2021 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja pada tahun sebelumnya.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Maksud dilaksanakan telaahan terhadap rancangan awal RKPD untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Perangkat Daerah dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk SKPD yang bersangkutan. Adapun review terhadap rancangan akhir RKPD Tahun 2024 dapat disajikan dalam tabel 2.4. dibawah ini :

Tabel 2.4.
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Rembang

KODE	RANCANGAN RKPD					RANCANGAN PERUBAHAN RKPD					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.18	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENANAMAN MODAL				6.653.344.065					3.912.191.886	
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN REMBANG		Nilai SAKIP	69,50	4.781.354.065	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Kab. Rembang	Nilai Sakip	74	3.532.063.886	
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penggangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		% keselarasan perencanaan terhadap capaian kinerja perangkat daerah	100	100.000.000	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Rembang	% keselarasan perencanaan terhadap capaian kinerja perangkat daerah	100	100000.000	
2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dok perencanaan perangkat daerah	2 dok	35.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dok perencanaan perangkat daerah	2 dok	2.500.000	
2.18.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jml dok RKA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan RKA- SKPD	4 dok	20.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		Jml dok RKA- SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan RKA- SKPD	4 dok	5.000.000	
2.18.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Capaian dan Ikhtisar Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 lap	45.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Capaian dan Ikhtisar Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	4 lap	2.500.000	

KODE	RANCANGAN RKPD					RANCANGAN PERUBAHAN RKPD					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Realisasi Kinerja SKPD			
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		% Dok Pelaporan Keuangan dengan Baik	100%	2.526.854.065	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		% Dok Pelaporan Keuangan dengan Baik	100%	2.344.823.261	
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jml org yang menerima gaji dan tunjangan ASN	23 org/bl	2.336.854.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jml org yang menerima gaji dan tunjangan ASN	25 org/bl	2.334.823.261	
2.18.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /verifikasi Keuangan SKPD		Jml dok penatausahaan yang disusun	12 dk	175.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /verifikasi Keuangan SKPD		Jml dok penatausahaan yang disusun	12 dk	-	
2.18.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Lap Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jml Lap Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Lap Koordinasi Penyusunan Lap Keuangan Akhir Tahun	1 lap	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Lap Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jml Lap Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Lap Koordinasi Penyusunan Lap Keuangan Akhir Tahun	1 lap	-	
2.18.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Lap keu bulanan/triwulan/se mesteran SKPD		Jm Lap keu bulanan/triwulan /semesteran dan lap koordinasi penyusunan lap keuan bulanan/triwulan/se mesteran SKPD	12 lap	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Lap keu bulanan/triwulan/ semesteran SKPD		Jm Lap keu bulanan/triwulana n/semesteran dan lap koordinasi penyusunan lap keuan bulanan/triwulan/ semesteran SKPD	12 lap	-	
2.18.01.2	Administrasi Barang Milik Daerah		Prosentase dokumen Penata Usahaan BMD dengan kualitas baik	100	25.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah		Prosentase dokumen Penata Usahaan BMD dengan kualitas baik	100	-	
2.18.01.2.1.01	Penatausahaan Barang Milik daerah Pada SKPD		Terlaksananya Penatausahaan barang Milik Daerah	2 dok	25.000.000	Penatausahaan Barang Milik daerah Pada SKPD		Terlaksananya Penatausahaan barang Milik Daerah	2 dok	-	

KODE	RANCANGAN RKPD					RANCANGAN PERUBAHAN RKPD					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.18.01.2.06	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		% Pemenuhan Pelayanan Kepegawaian	%	180.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		% Pemenuhan Pelayanan Kepegawaian	%	-	
2.18.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		Jumlah unit peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	1 unit	60.000.000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		Jumlah unit peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	1 unit	-	
2.18.01.2.05.03	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian		Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	4 dok	20.000.000	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian		Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	4 dok	-	
2.18.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan FUNgsi		Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	23 orang	100.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan FUNgsi		Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	23 orang	-	
2.18.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH		% Pemenuhan Pelayanan Umum	100%	401.000.000	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH		% Pemenuhan Pelayanan Umum	100	104.521.000	
2.18,01,2,06.01	Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	7.500.000	Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	3.752.000	
2.18,01,2,06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	140.160.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	-	
2.18.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	30.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	6.500.000	

KODE	RANCANGAN RKPD					RANCANGAN PERUBAHAN RKPD					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	100.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	22.067.500	
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	22.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	4.496.000	
2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Prundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang disediakan	2 dok	4.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Prundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Prundang Undangan	2 dok	-	
2.18.01.2.06.07	Penyediaan Bahan /Material		JUmlah Paket Bahan/Material yang disediakan	1 paket	40.000.000	Penyediaan Bahan /Material		JUmlah Paket Bahan/Material yang disediakan	1 paket	10.373.000	
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	40 laporan	150.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	40 laporan	57.332.500	
2.18.01.17.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		% Ketercukupan Sarana Prasarana Aparatur	95%	150.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		% Ketercukupan Sarana Prasarana Aparatur	95%	150.800.000	
2.18.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		JUmlah unit Peralatan dan dan mesin lainnya yang disediakan	unit	50.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		JUmlah unit Peralatan dan dan mesin lainnya yang disediakan		50.000.000	
2.18.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung kantor lainnya		JUmlah unit sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan Gedung lainnya yang disediakn	unit	100.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung kantor lainnya		JUmlah unit sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan Gedung lainnya yang disediakn		150.800.000	

KODE	RANCANGAN RKPD					RANCANGAN PERUBAHAN RKPD					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.18.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		% Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	1.138.500.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		% Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran		686.307.625	
2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan penyediaan surat menyurat	12 laporan	3.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan penyediaan surat menyurat	12 laporan	500.000	
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	360.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	187.200.000	
2.18.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 laporan	85.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 laporan	13.047.000	
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	690.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	485.560.625	
2.18.1.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		% BMD yang terpelihara dengan Kondisi Baik	%	260.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		% BMD yang terpelihara dengan Kondisi Baik	%	253.612.000	
2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan dalam kondisi baik	16 unit	60.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan dalam kondisi baik	16 unit	29.590.500	

KODE	RANCANGAN RKPD					RANCANGAN PERUBAHAN RKPD					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.18.01.2.09.02	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya		Jumlah dokumen pemeliharaan yang dikelola dengan baik	unit	200.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya		Jumlah dokumen pemeliharaan yang dikelola dengan baik	unit	206.021.500	
2.18.2.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		Jumlah Perusahaan yang mendapat fasilitas kemudahan/insentif penanaman modal	perusahaan	109.890.000	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		Jumlah Rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi penanaman Modal yang ditindak lanjuti		15.000.000	
2.18.2.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota		Draf dokumen regulasi yang tersusun	dokumen	16.500.000	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota		Jumlah rekomendasi laporan hasil evaluasi penanaman modal yang ditindak lanjuti		15.000.000	
2.18.2.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota		Jumlah perusahaan yang mendapatkan kemudahan berusaha	50 perusahaan	16.500.000	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota		Jumlah perusahaan yang mendapatkan kemudahan berusaha	50 perusahaan	15.000.000	
2.18.03.	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		Prosentase pertumbuhan investor	%	130.900.000	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		Prosentase pertumbuhan investor	%	126.000.000	
2.18.03.2.01.	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Prosentase promosi penanaman modal	%	130.390.000	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Prosentase promosi penanaman modal	%	126.000.000	
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal		Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanam	1 dok	130.900.000	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal		Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanam	1 dok	126.000.000	

KODE	RANCANGAN RKPD					RANCANGAN PERUBAHAN RKPD					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Daerah Kabupagten/Kota		modal kabupaten/kota			Daerah Kabupagten/Kota		modal kabupaten/kota			
2.18.04.	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		% Penyelesaian permohonan perijinan dan non perijinan sesuai SOP % penyelesaian penanganan pengaduan permasalahan perijinan dan non perijinan	%	1.485.200.000	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		% Penyelesaian permohonan perijinan dan non perijinan sesuai SOP % penyelesaian penanganan pengaduan permasalahan perijinan dan non perijinan	%	1.485.200.000	
2.18.04. 2.01.	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan seacra terpadu satu di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan	75%	1.485.200.000	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan seacra terpadu satu di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan	75%	1.485.200.000	
2.18.04 2.01. 0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah		Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	85 %	844.200.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah		Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan	85 %	29.000.000	
2.18.4. 2.01. 0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis		Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizinan	4500 pelaku usaha	641.000.000	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis		Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemeberian fasilitas/insentif	4500 pelaku usaha	42.128.000	

KODE	RANCANGAN RKPD					RANCANGAN PERUBAHAN RKPD					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Risiko Terintegrasi secara Elektronik		berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik			Risiko Terintegrasi secara Elektronik		yang menjadi kewenangan kabupaten/kota			
2.18.4. 2.01. 0007	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan berusaha Berbasis Risiko		Jumlah pelaku usaha yang memperoleh layanan konsultasi perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	1000 pelaku usaha		Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan berusaha Berbasis Risiko		Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	1000 pelaku usaha	19.500.000	
2.18.4. 2.01. 0008	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko		Jumlah kegiatan usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko lintas daerah kabupaten/kota bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha	3000 kegiatan usaha		Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko		Jumlah pelaku usaha yang memperoleh layanan konsultasi perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	3000 kegiatan usaha	19.500.000	
2.18.05.	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		% Investor yang taat aturan		146.000.000	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		% Investor yang taat aturan		129.000.000	
2.18.05. 2.01.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan		Persentase investor/perusahaan yang taat aturan tentang pelaksanaan penanaman modal	90%	146.000.000	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah		Persentase investor/perusahaan yang taat aturan tentang pelaksanaan penanaman modal	90%	129.000.000	

KODE	RANCANGAN RKPD					RANCANGAN PERUBAHAN RKPD					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Daerah Kabupaten/Kota					Kabupaten/Kot a					
2.18.05. 2.01. 0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang di Hadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya		Jumlah penyelesaian permasalahn dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	10 keg usaha	10.000.000	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang di Hadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya		Jumlah penyelesaian permasalahn dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	10 keg usaha	5.000.000	
2.18.05. 2.01. 0005	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha		Jumlah pelaku usaha yang mengikuti bimbingan teknis/ Sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis risiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko	50 keg usaha	60.000.000	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha		Jumlah pelaku usaha yang mengikuti bimbingan teknis/ Sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis risiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko	50 keg usaha	74.000.000	
2.18.05. 2.01. 0006	Pengawasan Penanaman Modal		Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usahadari pelaku dilakukan inspeksi lapangan ; serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha	60 keg usaha	76.000.000	Pengawasan Penanaman Modal		Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usahadari pelaku dilakukan inspeksi lapangan ; serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha	60 keg usaha	50.000.000	

Secara umum, rancangan Awal RKPD Kabupaten Rembang tahun 2024 telah menggambarkan kebutuhan pendanaan program dan kegiatan DPMPTSP. Meskipun demikian, pada tahap perencanaan selanjutnya dapat terjadi dinamika Rancangan Awal program dan kegiatan karena adanya penyesuaian terhadap kebijakan atau regulasi yang baru yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 050 5889 tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, atau terdapat penyesuaian pada saat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada sisi legislatif, di mana program dan kegiatan perlu mengakomodir aspirasi dari masyarakat.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah dalam mendukung pelaksanaan visi dan misi Bupati Rembang. Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan. mengacu pada RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang mempunyai tujuan sebagai berikut:

Tujuan Misi III

Dalam melaksanakan Misi III yaitu ***“Membangun Infrastruktur dan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan”*** maka : tujuan yang ditetapkan : **“Terwujudnya Pembangunan ekonomi Daerah”**

Sasaran:

Meningkatnya pertumbuhan sector unggulan dan peran investasi terhadap ekonoi daerah

Indikator Sasaran :

Rata-rata Nilai SKM (Survey Kepuasan Masyarakat) pada Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan publik

Tujuan Misi III

Dalam melaksanakan Misi III yaitu ***“Meningkatkan investasi serta mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif”***, tujuan yang ditetapkan adalah: Meningkatkan investasi dengan memanfaatkan potensi lokal dan berwawasan lingkungan. Sasaran : Meningkatkan nilai investasi

Indikator Sasaran: Realisasi investasi PMA dan PMDN
Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Dinas Penanaman

Modal Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Rembang
sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah DPMPSTSP
Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE				
				2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatkan Pertumbuhan Serktor Unggulan dan Peran investasi terhadap ekonomi daerah		Persentase Pertumbuhan realisasi penanaman modal/investasi	%	5 %	5 %	6%	6,27	6,54	7,32	8,28
	Meningkatnya Penanaman Modal	Nilai Investasi Penanaman Modal	T	1	1	1.108	1.192	1.282	1.379	1.484
	Meningkatnya Pelayanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat	%	85	85	85	86	87	88	89

Strategi dan kebijakan dalam pemenuhan tujuan pembangunan daerah untuk peningkatan penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu di dalam misi pembangunan Kabupaten Rembang dijabarkan sebagai berikut :

Tujuan 1 :

meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif,akuntabel, transparan dan partisipatif

Strategi : Mewujudkan Pelayanan Publik Prima berbasis teknologi informasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik, pelaksanaan evaluasi kinerja pelayanan publik, dan melakukan survey kepuasan masyarakat secara berkala

Arah Kebijakan : Meningkatkan standar mutu dan pengembangan sistem pelayanan dan pengaduan publik yang terintegrasi

Tujuan 3 : Meningkatkan investasi dengan memanfaatkan potensi lokal dan berwawasan lingkungan

Strategi : Meningkatkan daya saing investasi melalui promosi investasi secara berkelanjutan berbagai media, menyediakan dan menyederhanakan pelayanan investasi serta pemberian insentif atau keringan pajak bagi investor.

Arah Kebijakan :

- (1). Peningkatan promosi dan kemitraan investasi
- (2). Peningkatan pelayanan investasi berbasis teknologi informasi

Strategi dan kebijakan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang dalam lima tahun mendatang, sebagaimana telah dirumuskan sebelumnya dituangkan sebagaimana Tabel berikut:

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
DPMPTSP KABUPATEN REMBANG

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif,akuntabel, transparan dan partisipatif	Terciptanya pelayanan publik yang tanggap dan prima	Mewujudkan Pelayanan Publik Prima berbasis teknologi informasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik, pelaksanaan evaluasi kinerja pelayanan publik, dan melakukan survey kepuasan masyarakat secara berkala	Meningkatkan standar mutu dan pengembangan sistem pelayanan dan pengaduan publik yang terintegrasi

Meningkatkan investasi dengan memanfaatkan potensi lokal dan berwawasan lingkungan	Meningkatnya nilai Investasi	Meningkatkan daya saing investasi melalui promosi investasi secara berkelanjutan berbagai media, menyediakan dan menyederhanakan pelayanan investasi serta pemberian insentif atau keringan pajak bagi investor.	Peningkatan promosi dan kemitraan investasi
--	------------------------------	--	---

3.2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perubahan Renja Tahun 2024

Untuk dapat menjawab dinamika kebijakan terkait teknis pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang , maka disusun prioritas program dan kegiatan dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2024.

Sedangkan untuk program dan kegiatan serta sub kegiatan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rembang Tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Urusan Pemerintahan Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota

1. Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-DPA
 3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 4. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 6. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 7. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 8. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan
 10. Penyediaan Bahan Material

11. Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 12. Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan gedung lainnya
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 13. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 14. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
 15. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 16. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 17. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

II. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

7. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
18. Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/kota

III. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL

8. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
19. Pelaksanaan kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

IV. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

9. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
20. Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah
21. Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi secara Elektronik
22. Penyediaan dan pengolahan layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis resiko
23. Pemantauan , analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis resiko

V. PROGRAM PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL

10. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

- 24. Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya
- 25. Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha
- 26. Pengawasan Penanaman Modal

Jumlah program dan kegiatan untuk Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Rembang adalah sejumlah 5 program urusan Penanaman Modal serta 10 kegiatan dan 26 sub kegiatan. Kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya yaitu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2024 dengan total sebesar Rp. 3.768.484.000,- terdiri dari Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan) sebesar Rp. 2.375.596.000,- dan belanja operasional senilai Rp1.392.888.000,-

Adapun rincian anggaran berdasarkan urusan adalah sebagai berikut : . Rincian rencana kerja dan pendanaan DPMPTSP Kabupaten Rembang sebagaimana tertera dalam tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.2

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan DPMPSTSP Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kode Rek	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan	Perkiraan Maju Rencana tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kunderja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			6,7					
2.18	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENANAMAN MODAL				3.733.171.283				7.845.000.000
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN REMBANG	Nilai SAKIP	Kab.Rembang	69,50	3.524.921.283				
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% keselarasan perencanaan terhadap capaian kinerja perangkat daerah	Kab.Rembang	100	10.000.000				
2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dok perencanaan perangkat daerah	Kab.Rembang	2 dok	2.500.000			2 dok	50.000.000
2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jml dok RKA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan RKA-SKPD	Kab.Rembang	4 dok	5.000.000			2 dok	30.000.000
2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian dan Ikhtisar Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab.Rembang	4 lap	2.500.000			2 dok	55.000.000
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Dok Pelaporan Keuangan dengan Baik	Kab.Rembang	100%	2.375.596.000				
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jml org yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kab.Rembang	23 org/bl	2.375.596.000			23 org	3.000.000.000
2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab.Rembang	1 lap				1 lap	8.000.0000
2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Kab.Rembang	12 lap				12 lap	15.000.000

Kode Rek	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan	Perkiraan Maju Rencana tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kunerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD							
2.18.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	% Pemenuhan Pelayanan Umum	Kab.Rembang	100%	96.675.000			100%	
2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kab.Rembang	1 paket	4.000.000			1 paket	30.000.000
2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab.Rembang	1 paket	6.500.000			1 paket	30.000.000
2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab.Rembang	1 paket	32.150.000			1 paket	125.000.000
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab.Rembang	1 paket	3.025.000			1 paket	25.000.000
2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Prundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang disediakan	Kab.Rembang	2 dok	2.000.000			2 dok	5.000.000
2.18.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan /Material	JUmlah Paket Bahan/Material yang disediakan	Kab.Rembang	1 paket	9.000.000			1 paket	45.000.000
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab.Rembang	40 laporan	40.000.000			40 laporan	200.000.000
2.18.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% Ketercukupan Sarana Prasarana Aparatur	Kab.Rembang	95%	150.000.000			95%	
2.18.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung kantor lainnya	JUmlah unit sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan Gedung lainnya yang disediakn	Kab.Rembang	unit	150.000.000			unit	100.000.000
2.18.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab.Rembang	%	725.780.000			%	
2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan penyediaan surat menyurat	Kab.Rembang	12 laporan	5.000.000			12 laporan	5.000.000
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakn	Kab.Rembang	12 laporan	187.200..000			12 laporan	400.000.000
2.18.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kab.Rembang	12 laporan	27.000.000			12 laporan	100.000.000

Kode Rek	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan	Perkiraan Maju Rencana tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kunerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Kab.Rembang	12 laporan	511.080.000			12 laporan	900.000.000
2.18.1.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% BMD yang terpelihara dengan Kondisi Baik	Kab.Rembang	%	230.305.000			%	80.000.000
2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dalam kondisi baik	Kab.Rembang	16 unit	30.305.000			16 unit	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			200.000.000				
2.18.2.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Perusahaan yang mendapat fasilitas kemudahan/insentif penanaman modal	Kab.Rembang	perusahaan	16.000.000			perusahaan	
2.18.2.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Penanaman Modal	Draf dokumen regulasi yang tersusun	Kab.Rembang	dokumen	16.000.000	Dana Tranfer Umum-Dana Bagi Hasil		dokumen	45.000.000
2.18.2. 2.01.003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/kota	Jumlah perusahaan yang mendapatkan kemudahan berusaha	Kab.Rembang	50 perusahaan	16.000.000			50 perusahaan	45.000.000
2.18.03.	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Prosentase pertumbuhan investor		%	14.000.000			%	150.000.000
2.18.03. 2.01.	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase promosi penanaman modal	Kab.Rembang	%	14.000.000			%	150.000.000
2.18.03 2.01. 002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Kabupagten/Kota	Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanam modal kabupaten/kota	Kab.Rembang	1 dok	14.000.000	Dana Tranfer Umum-Dana Bagi Hasil		1 dok	150.000.000
2.18.04.	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	% Penyelesaian permohonan perijinan dan non perijinan sesuai SOP % penyelesaian penanganan pengaduan permasalahan perijinan dan non perijinan	Kab.Rembang	%	110.128.000			%	
2.18.04. 2.01.	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan seacra terpadu satu di bidang Penanaman Modal	Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan	Kab.Rembang		110.128.000				

Kode Rek	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan	Perkiraan Maju Rencana tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kunerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								
2.18.04 2.01. 005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah		Kab.Rembang		30.000.000	Dana Tranfer Umum-Dana Bagi Hasil			900.000.000
2.18.4. 2.01. 006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berudaha mealuli sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi secara Elektronik		Kab.Rembang		40.128.000	Dana Tranfer Umum-Dana Bagi Hasil			650.000.000
2.18.4. 2.01. 007	Penyediaan dan pengolahan layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis resiko		Kab.Rembang		20.000.000	Dana Tranfer Umum-Dana Bagi Hasil			450.000.000
2.18.4. 2.01. 008	Pemantauan , analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berisaha berbasis resiko		Kab.Rembang		20.000.000	Dana Tranfer Umum-Dana Bagi Hasil			300.000.000
2.18.05.	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	% Investor yang taat aturan	Kab.Rembang		40.000.000				
2.18.05. 2.01.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase investor/perusahaan yang taat aturan tentang pelaksanaan penanaman modal	Kab.Rembang	90%	40.000.000			90%	
2.18.05. 2.01. 004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya		Kab.Rembang	Kegiatan usaha	5.000.000			Kegiatan usaha	40.000.000
2.18.05. 2.01. 005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha		Kab.Rembang	Pelaku usaha	20.000.000			Pelaku usaha	65.000.000
2.18.05. 2.01. 006	Pengawasan Penanaman Modal		Kab.Rembang	Kegiatan usaha	15.000.000			Kegiatan usaha	60.000.000

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang merupakan dasar pedoman bagi pelaksanaan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang selama jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2024. Dengan ditetapkannya dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang tahun 2024, maka dalam penyusunan RKPD, KUA, dan PPAS akan dilakukan dengan dasar pada isi Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang tahun 2024 ini. Kebutuhan dana/pagu indikatif dimaksud dalam rancangan akhir renja ini masih dapat berubah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah serta penyesuaian terhadap RKPD Kabupaten Rembang dan ketentuan yang berlaku.

Demikian Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang Tahun 2024 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam menyusun program dan kegiatan prioritas pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang Tahun anggaran 2024. Melalui dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2024 ini, diharapkan untuk dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan program /kegiatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang selama satu tahun dalam mendukung pencapaian prioritas pembangunan Kabupaten Rembang Tahun 2024.

Rembang, 20 September 2024
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Rembang



BUDIYONO, S.Kom, MM
Pembina
NIP.19770303 200604 1 019

